

1. Nama Organisasi:

Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

2. Tugas:

Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

3. Fungsi:

- a. Koordinasi kegiatan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
- b. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
- d. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pengelolaan pengadaan barang/jasa;
- g. Pengelolaan data dan informasi; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Kode	Indikator Kinerja Utama/ Uraian
S.S.1	SDM yang Kompetitif
I.K.1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemenko Polhukam

Kode	Indikator Kinerja Utama/ Uraian
	Deskripsi
	Indeks profesionalitas ASN adalah instrument yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme Aparatur Sipil Negara.
	Sumber Data
	Sumber data yang diperoleh dari data pegawai meliputi : a) Pendidikan Formal b) Kompetensi Pegawai c) Penilaian Prestasi Kerja d) Disiplin Pegawai.
	Cara Menghitung
	Perhitungan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, sebagai berikut : a) Kualifikasi Pendidikan Formal (25%) <ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan S-3 (Nilai 25) - Pendidikan S-2 (Nilai 20) - Pendidikan S-1/D-IV (Nilai 15) - Pendidikan D-III (Nilai 10) - Pendidikan D-II/D-I/SLTA/Sederajat (Nilai 5) - Dibawah SLTA (Nilai 1) b) Kompetensi Pegawai (40%) Disesuaikan berdasarkan kedudukan dalam jabatan, seperti : <ul style="list-style-type: none"> - Diklat Kepemimpinan untuk pejabat struktural (Nilai 15) jika belum (Nilai 0) - Diklat Fungsional untuk pejabat Fungsional (Nilai 15) jika belum (Nilai 0) - Diklat Teknis bagi PNS yang Menduduki JPT/JA/JF paling sedikit 20 JP yang mendukung tugas dan fungsi

Kode	Indikator Kinerja Utama/ Uraian
	<p>jabatan (Nilai 15) jika belum (Nilai 0)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diklat Teknis bagi PNS yang menduduki jabatan pelaksana paling sedikit 20 JP yang mendukung tugas dan jabatan dalam 1 tahun terakhir (Nilai 22.5) jika belum (Nilai 0) - Seminar/Workshop/Magang/Kursus/Sejenisnya bagi PNS yang Menduduki JPT/JA/JF paling sedikit 20 JP yang mendukung sesuai jabatannya dalam 2 tahun terakhir (Nilai 10) jika belum (Nilai 0) - Seminar/Workshop/Magang/Kursus/Sejenisnya bagi PNS yang Menduduki jabatan pelaksana paling sedikit 20 JP yang mendukung sesuai jabatannya dalam 2 tahun terakhir (Nilai 17.5) jika belum (Nilai 0) <p>c) Penilaian Prestasi Kerja (30%)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penilaian Prestasi Kerja dengan Nilai 91-100 dalam 1 tahun terakhir (Nilai 30) - Penilaian Prestasi Kerja dengan Nilai 76-90 dalam 1 tahun terakhir (Nilai 25) - Penilaian Prestasi Kerja dengan Nilai 61-75 dalam 1 tahun terakhir (Nilai 15) - Penilaian Prestasi Kerja dengan Nilai 51-60 dalam 1 tahun terakhir (Nilai 5) - Penilaian Prestasi Kerja dengan Nilai 50 kebawah dalam 1 tahun terakhir (Nilai 1) <p>d) Disiplin Pegawai (5%)</p> <ul style="list-style-type: none"> - PNS tidak pernah dijatuhi Hukuman Disiplin (Nilai 5) - PNS dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat ringan (Nilai 3) - PNS dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat sedang (Nilai 2) - PNS dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat berat (Nilai 1) <p>Hukuman Disiplin telah mempunyai keputusan final dihitung dalam waktu 5 tahun terakhir</p>
	Unit Bertanggungjawab

Kode	Indikator Kinerja Utama/ Uraian
	Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan.
	Penanggungjawab Data
	Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan.

Kode	Indikator Kinerja Utama/ Uraian
S.S.2	Organisasi yang Fit & Purpose
I.K.2	Nilai Reformasi Birokrasi Kemenko Polhukam
	Deskripsi
	Penilaian Reformasi Birokrasi yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB sesuai Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2011 tentang <i>Grand Design</i> Reformasi Birokrasi Indonesia 2010-2025. Terdapat 8 (delapan) area perubahan yang menjadi penilaian dalam Reformasi Birokrasi yaitu area manajemen perubahan, area penataan dan penguatan organisasi, area penataan peraturan perundang-undangan, area penataan sumber daya manusia, area penataan tata laksana, area penguatan pengawasan, area penguatan akuntabilitas kinerja, dan area peningkatan kualitas pelayanan publik.
	Sumber Data
	Indeks RB yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB sebagai tim penilai Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga.
	Cara Menghitung
	Lembar Kerja Evaluasi Tim Penilai Kemenpan RB.
	Unit Bertanggungjawab
	Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan.
	Penanggungjawab Data
	Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan.

Kode	Indikator Kinerja Utama/ Uraian
S.S.3	Layanan Dukungan Sekretariat dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya yang Optimal
I.K.3.1	Indeks Kepuasan Layanan Dukungan Sekretariat
	Deskripsi
	Indeks kepuasan layanan dukungan Sekretariat adalah data

Kode	Indikator Kinerja Utama/ Uraian
	dan informasi tentang tingkat kepuasan layanan dukungan Sekretariat yang diperoleh dari hasil pengukuran kuantitatif dan kualitatif atas pendapat pelanggan dalam memperoleh pelayanan dengan membandingkan antara harapan dan kenyataan.
	Sumber Data
	Pelaksanaan survey yang dilakukan pada seluruh unit kerja di bawah koordinasi Sesmenko Polhukam.
	Cara Menghitung
	$\Sigma = \mu$ indeks kepuasan layanan pada unit organisasi di bawah koordinasi Sesmenko Polhukam.
	Unit Bertanggungjawab
	Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan.
	Penanggungjawab Data
	Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan.
I.K.3.2	% (Presentase) Laporan Penyelesaian Tugas Teknis Lainnya yang ditindaklanjuti Menko Polhukam
	Deskripsi
	Mengukur sejauh mana rekomendasi yang dihasilkan, dapat berpengaruh terhadap tercapainya pembangunan bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan yang tertuang dalam dokumen perencanaan nasional. Hal ini diperlukan agar Kemenko Polhukam dapat melakukan monitoring dan follow up atas rekomendasi yang dihasilkan dan untuk memastikan bahwa rekomendasi ditindaklanjuti oleh K/L terkait.
	Sumber Data
	Laporan penyelesaian tugas teknis lainnya yang ditindaklanjuti Menko Polhukam.
	Cara Menghitung
	$\Sigma =$ presentase laporan penyelesaian tugas teknis lainnya yang ditindaklanjuti Menko Polhukam.
	Unit Bertanggungjawab
	Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan.
	Penanggungjawab Data
	Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum

Kode	Indikator Kinerja Utama/ Uraian
	dan Keamanan.

Kode	Indikator Kinerja Utama/ Uraian
S.S.4	Pengelolaan Anggaran yang Akuntabel dan Optimal
I.K.4.1	Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemenko Polhukam
	Deskripsi
	Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan Pemerintah. BPK, yaitu : WTP, WDP, <i>adverse</i> , dan <i>disclaimer</i> .
	Sumber Data
	Laporan hasil pemeriksaan Laporan Keuangan BPK RI.
	Cara Menghitung
	Penilaian yang berasal dari BPK RI.
	Unit Bertanggungjawab
	Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan.
	Penanggungjawab Data
	Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan.
I.K.4.2	Nilai SAKIP Kemenko Polhukam
	Deskripsi
	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian yang sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengiktisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Komponen dalam penilaian evaluasi SAKIP yaitu: 1. Perencanaan Kinerja 2. Pengukuran Kinerja 3. Pelaporan Kinerja 4. Evaluasi Internal 5. Capaian Kinerja
	Sumber Data
	Inspektorat Kemenko Polhukam
	Cara Menghitung

Kode	Indikator Kinerja Utama/ Uraian
	Kategori Penilaian: 1. AA (>90-100) 2. A (>80-90) 3. BB (>70-80) 4. B (>60-70) 5. CC (>50-60) 6. C (>30-50) 7. D (0-30)
	Unit Bertanggungjawab
	Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan.
	Penanggungjawab Data
	Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan.
I.K 4.3	Nilai Evaluasi RKA- K/L Kemenko Polhukam
	Deskripsi
	Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan RKA-K/L selanjutnya disebut evaluasi kinerja adalah proses untuk menghasilkan informasi capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen RKA-K/L.
	Sumber Data
	Data Dokumen RKA-K/L, Data RKA-K/L DIPA, SP2D, Bukti-bukti yang kredibel, Review Dokumen, Survey atau FGD.
	Cara Menghitung
	1. Pengukuran Aspek Implementasi 2. Pengukuran Aspek Manfaat 3. Pengukuran Aspek Konteks *pengukuran dilakukan melalui aplikasi SMART DJA
	Unit Bertanggungjawab
	Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan.
	Penanggungjawab Data
	Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan.